Kedaulatan Rakyat (Hal.3/HLD) **Sabtu, 3 Mei 2025**

Kasus BUKP, Pemda DIY Tangani Sistematis

YOGYA (KR) - Pemda DIY mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh nasabah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Wates dan BUKP Galur.

Secara cermat dan sistematis, penanganan akan dilakukan melalui klasifikasi jenis simpanan nasabah yang perlu ditangani.

"Penyelesaian ini akan diprioritaskan pada pembayaran simpanan nasabah yang tercatat dalam aplikasi sistem informasi keuangan BUKP Wates dan BUKP Galur. Pemda DIY memastikan bahwa kedua institusi ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran simpanan tersebut secara institusi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda DIY, Wiyos Santoso di Yogyakarta, Jumat (2/5).

Diberitakan sebelumnya, nasabah BUKP Wates dan BUKP Galur kesulitan menarik simpanannya karena kedua BUKP tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas disebabkan adanya penggunaan uang BUKP dan uang nasabah oleh oknum pengurus yang sudah diakui oleh yang bersangkutan dalam berita acara pembinaan dan pengawasan.

Menurutnya, dalam kasus itu simpanan nasabah tercatat dalam aplikasi sistem informasi keuangan tetapi kemudian diambil oleh oknum pengurus. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya selisih antara saldo yang tercatat dan buku tabungan atau bilyet deposito yang dimiliki nasabah. Saldo yang tercatat dalam aplikasi sistem informasi keuangan akan dikembalikan kepada nasabah oleh BUKP Wates dan BUKP Galur.

"Selisih antara saldo aplikasi dan buku tabungan/ bilyet deposito menjadi tanggung jawab oknum pengurus untuk mengembalikannya. Proses pembayaran kepada nasabah akan dilakukan melalui verifikasi yang cermat untuk menghindari kesalahan," jelas Wiyos.

Wiyos mengungkapkan, untuk simpanan nasabah yang penyetorannya dilakukan melalui oknum pengurus tetapi tidak dibukukan atau disetorkan dalam aplikasi sistem informasi keuangan, pengembalian simpanan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab oknum pengurus. Pemda DIY menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini. Adapun untuk proses verifikasi pembayaran kepada nasabah akan dilakukan dengan melibatkan daftar nasabah yang akan mengambil simpanannya. Pengambilan itu harus disertai dengan salinan buku tabungan atau bilyet deposito sebagai bukti.

"Pemda DIY berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu nasabah BUKP Wates dan BUKP Galur dapat kembali mengakses simpanan mereka dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dengan langkah-langkah yang cermat dan terencana, diharapkan BUKP dapat beroperasi dengan lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah," paparnya.

(R[illegible])-f